

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Bernard Nainggolan. *Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit*. PT Alumni. Bandung. 2014.
- Daniel Suryana. 2007. *Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing oleh Pengadilan Niaga Indonesia*. Pustaka Sutra: Bandung.
- Erna Widjajati. 2014. *Hukum Perusahaan dan Kepailitan di Indonesia*. CV. Jalin Usaha Rapi. Jakarta.
- Hardjowahono. Bayu Seto. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional* (Buku Kesatu Edisi Kelima). Penerbit PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Hikmah. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Perkara-Perkara Kepailitan*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum. Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Hukum*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Jono. 2008. *Hukum Kepailitan*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kholis Roisah. 2015. *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Malang. Setara Press.
- M. Hadi Shubhan. 2009. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R . Agoes. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. cet. 7. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Putra, F. M. K. 2014. *Eksistensi Kreditor Separatis Sebagai Pemohon Dalam Perkara Kepailitan. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 1-19.

- Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Kepailitan*. Bayu Media: Malang.
- Ridwan Khairandy. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Simanjuntak dan Ricardo. 2005. "Ketentuan Hukum Internasional dari UU Nomor 4 Tahun 1998 (*Cross-Border Insolvency*)" pada Emmy Yuhassarie. *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*. Pusat Pengkajian Hukum. Jakarta.
- Siti Anisah. 2008. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan Indonesia*. Yogyakarta. Total Media.
- Sudargo dan Gautama. 2007. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Sugeng Bambang dan Sujayadi. 2013. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Ligilasi*. Kharisma Putra Utama: Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Sutan Remi Sjahdeini. 2018. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Kencana Prenadamedia Group: Jakarta.
- Syamsudin Sinaga. 2012. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Tatanusa: Jakarta.
- Tineke Louise Tuegeh Longdong. 1998. *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

## **JURNAL**

- Amalia, J. Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Crossborder Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol. 2. 2019.
- Annisa Fitria, Tinjauan Hukum Eksekusi Harta Pailit Debitor Di Luar Negeri, *Lex Journalica*, Volume 17 Nomor 3, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, 2020.
- Arkisman. "Pelaksanaan Tugas Kurator Dalam Mengurus Harta Pailit Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004

- Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. *Jurnal Pro Hukum*. Vol. 4. Nomor 1 2015.
- Gedalya Iryawan Kale dan A.A.G.A. Dharmakusuma. “Syarat Kepailitan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Debitor Dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004”. *Kertha Semaya*. Vol. 6. Nomor 3. 2018.
- I Dewa Agung Deandra Juniarta & Ida Ayu Sukihana, Kewenangan Pengadilan Niaga Indonesia Dalam Eksekusi Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Negeri. *Kertha Semaya:Journal Ilmu Hukum*. Universitas Udayana,V.7. Nomor 8. 2019.
- I Dewa Made Adhi Utama, Dewa Gde Rudy. “Penyelesaian Perkara Kepailitan Dengan Harta Pailit Berada Di Luar Negeri.” *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*. Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.
- Julian Male. “Cross-Border Insolvency Harmonizing Treaties Becoming Important”. *Asia-Pacific Housing Journal* No.4 Vol. 13. 2011.
- Kartoningrat R. B. dan Andayani. I. “Mediasi Sebagai Alternatif dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator Kepailitan”. *Halu Oleo Law Review*. 2018.
- Puspitasari S, Septiandani, Sulistyani RS dan Sukarna. “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency”, *Jurnal USM Law Review*. Vol. 4. Nomor 2 2021.
- Ratnawati, T. E. Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Kajian terhadap Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No. 2. 2009.
- Ricardo Simanjuntak. *Dispute Settlement Mechanism Under The ASEAN Legal Frameworks: A Collective Commitment Creating The Rules-Based ASEAN Economic Community*. Jakarta: Kontan Publishing. 2014.
- Rizka Rahmawati. “Eksekusi Aset Debitor yang Berada di Luar Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan”, *Jurnal SASI*. Vol. 25 nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2019.
- Satrio, Kartikasari dan Faisal. “Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan

Pemenuhan Hak-hak Kreditor”. *Ganesha Law Review*. Vol. 2. 2020.

Sihotang, E. G., Atmadja, I. B. P. dan Sukihana, I. A.. “Dasar Pertimbangan Hakim Dan Upaya Hukum Debitor Pailit Terkait Penggunaan Paksa Badan Dalam Kepailitan”. *Kertha Semaya*. 2018.

Siti Nurjanah. Pelaksanaan Putusan Pailit Pengadilan Indonesia Terhadap Pailit Yang Melintas Batas Negara. *Journal of Judicial Review*. Vol. XIX No. 1. 2017.

Sonyendah Retnaningsih. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Pailit Individu Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Di Indonesia”. *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*. Vol. 3. Nomor 1. 2018.

Loura Hardjaloka, Kepailitan Lintas Batas Perspektif Hukum Internasional Dan Perbandingannya Dengan Instrumen Nasional Di Beberapa Negara, *Jurnal Yuridika*, Volume 30 No. 3, hlm. 408-409. 2015.

## **TESIS**

M. Ngamirul Bustanil Asyhar Assalmani. 2018. “Konsep Pengaturan Cross-Border Insolvency Badan Usaha di Associations of Southeast Asian (ASEAN) dalam Rangka Mewujudkan ASEAN Economic Integration”. Tesis. Magister Hukum. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Kurniawan. 2007. “PEMBERESAN HARTA PAILIT PADA PERUSAHAAN PERORANGAN (STUDI KASUS PADA PT. SIERAD PRODUCE Tbk)”. Tesis. Magister Hukum. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang

## **SKRIPSI**

Andi Reski Nur Fatimah. 2021. “Sita Umum Aset Debitor Pailit Yang Berada Di Luar Wilayah Yurisdiksi Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 138/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst)”. Skripsi. Serjana Hukum. Program Strata 1 Universitas Hasanuddin. Makassar.

Arindra Maharany. 2011. “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Instrumen Hukum Internasional Dalam Pengaturan Kepailitan Lintas Batas di Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Jepang”. Skripsi. Serjana Hukum. Program Strata 1 Universitas Indonesia. Depok.

Andi Fadilla Jamila. 2016. "Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Kepailitan Lintas Negara". Skripsi. Serjana Hukum. Program Strata 1 Universitas Hasanuddin. Makassar.

Anggitya Maharsi. 2019. "Pemberesan Harta Debitor Pailit Dalam Kepailitan Lintas Batas Negara (*Cross-Border Insolvency*) Yang Diputuskan Oleh Pengadilan Niaga Indonesia". Skripsi. Serjana Hukum. Program Strata 1 Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.

## **SITUS DARING**

United Nations Commission on International Trade Law Official Website. Diakses dari [https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/model\\_law/cross-border\\_insolvency](https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/model_law/cross-border_insolvency) 9 Desember 2021, Pukul 12.35 WITA.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lembaran Negara Nomor 131 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443.

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 Pembentukan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, Dan Pengadilan Negeri Semarang Presiden Republik Indonesia.

## **PUTUSAN**

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 138/Pdt.SusPKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 64/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.